

Jurnal Ranah Publik Indonesia Kontemporer

<https://rapik.pubmedia.id/index.php/rapik>

Implementasi Kebijakan Desa Bengkel Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat Dalam Pengelolaan Sampah Sistem Zero Waste

Dina Hartiani¹⁾, Ilham Zitri^{2*)}

^{1,2} Universitas Muhammadiyah Mataram

Email:² ilham.zitri@ummat.ac.id

ARTICLE INFO

Article history:

Send 17/05/2024

Received 13/06/2024

Accepted 28/07/2024

Abstract

Waste problems have become a serious problem, especially in big cities and densely populated areas. Especially in the Bengkel Village area, Labuapi District, and West Lombok Regency, there are still piles of garbage on the side of the road and on empty land that is not a TPS. This research was conducted in Bengkel Village, Labuapi District, West Lombok Regency. This study aims to know the implementation of the zero waste management policy. This research uses qualitative methods. The data sources in this study are primary data and secondary data. The data analysis technique in this research is NVivo, the data reduction stage, data presentation and conclusion drawing. The results showed that the Implementation of the Zero Waste System Waste Management Policy has generally been implemented and realized. It can be seen from (1) The behaviour of inter-organizational relations in Bengkel Village has gone well with the commitment of the village government community leaders in realizing the Village Regulation on Waste Management and the coordination of the Village Government with the hamlet heads. (2) Lower Level Implementor Behavior has been implemented. It can be seen from the organizational control, work ethic, and professionalism of lower-level bureaucrats. (3) Target Group Behavior, namely the community, gives a positive response and supports the waste management policy in Bengkel village. Supporting factors in the Implementation of the Zero Waste System Waste Management Policy are the fleet of garbage trucks, 3-wheeled garbage transportation facilities, garbage can facilities, and sufficient waste workers. While the inhibiting factors in the Implementation of the Zero Waste System Waste Management Policy are lack of public awareness, weather constraints, lack of waste transportation facilities or meters, zero waste socialization has not been comprehensive, and the construction of TPS is constrained by location or land.

Keywords: Implementation, Policy, Zero Waste

Abstrak

Permasalahan sampah sudah menjadi persoalan serius terutama di kota besar maupun di kawasan padat penduduk. Khususnya di kawasan Desa Bengkel Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat, masih terdapat tumpukan-tumpukan sampah dipinggir jalan maupun dilahan lahan yang kosong yang bukan menjadi TPS. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Bengkel Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan pengelolaan sampah sistem zero waste. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik analisa data dalam penelitian ini adalah NVivo, tahap reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Sistem Zero Waste umumnya sudah terlaksana dan direalisasi. Hal ini dapat dilihat dari (1) Perilaku hubungan antar organisasi di Desa Bengkel telah

berjalan baik dengan komitmen pemerintah desa, tokoh masyarakat dalam merealisasikan Peraturan Desa Tentang Pengelolaan Sampah dan koordinasi Pemerintah Desa dengan kepala dusun. (2) Perilaku Implementor Tingkat Bawah telah dilaksanakan hal ini dapat dilihat dari kontrol organisasi, etos kerja, dan profesionalitas para birokrat tingkat bawah. (3) Perilaku Kelompok Sasaran yaitu masyarakat memberikan respon positif dan mendukung kebijakan pengelolaan sampah di desa Bengkel. Faktor pendukung dalam Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Sistem Zero Waste yaitu armada truk pengangkut sampah, fasilitas pengangkut sampah roda 3, fasilitas tong sampah dan tenaga sampah yang cukup. Sedangkan faktor penghambat Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Sistem Zero Waste yaitu kurangnya kesadaran masyarakat, kendala cuaca, kurang fasilitas pengangkut sampah atau argo, sosialisasi zero waste belum menyeluruh dan pembangunan TPS terkendala lokasi atau lahan.

Kata kunci: *Implementasi, Kebijakan, Zero Waste*

*Penulis Korespondensi

E-mail : Ilham.zitri@ummat.ac.id

PENDAHULUAN

Permasalahan sampah merupakan fenomena sosial yang belum mampu diatasi sepenuhnya oleh pemerintah Indonesia (Sholihah et al., 2022). Setiap kota dan desa di Indonesia dengan jumlah penduduk yang besar dan kebiasaan konsumsi yang berbeda-beda pasti menghadapi permasalahan sampah ini akibat tingginya aktivitas masyarakat (Sunaryo et al., 2022). Pola konsumsi dan jumlah penduduk yang demikian pada akhirnya dapat menyebabkan jumlah, jenis, dan karakteristik sampah terus meningkat dan menjadi permasalahan karena tidak diimbangi dengan pengelolaan sampah yang baik (Bharata et al., 2023). Permasalahan sampah dapat teratasi apabila masyarakat dan pemerintah mampu dan mau melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengelolaan sampah secara penuh tanggung jawab (Nurlina et al., 2014).

Sampah yang ada disekitar kita sangatlah banyak jenisnya, misalnya sampah rumah tangga, sampah industri, sampah peternakan, sampah perkebunan, sampah pasar, sampah perkantoran dan komersial merupakan contoh sampah yang dikelompokkan berdasarkan sumbernya (Basri et al., 2021). Untuk mengurangi jumlah sampah yang terus bertambah, berbagai metode telah diperkenalkan di pemerintah kota, seperti pembuatan kompos dan daur ulang sampah menjadi peralatan rumah tangga atau peralatan daur ulang lainnya (Zitri et al., 2022). Namun pemanfaatan timbunan sampah tidak menimbulkan efek atau pergerakan serupa di masyarakat. Kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan masih belum terlihat di masyarakat, sehingga masih banyak tumpukan sampah dimana-mana (Zitri et al., 2023).

Permasalahan sampah di Nusa Tenggara Barat masih menjadi permasalahan pemerintah karena didorong oleh pertumbuhan masyarakat dan kesadaran masyarakat terhadap permasalahan sampah masih sangat rendah (Pepadu et al., 2023). Masih sering dijumpai sampah yang tidak pada tempatnya atau penduduk yang membuang sampah sembarangan. kesadaran masyarakat terhadap masalah sampah masih rendah karena cara berpikir terhadap masalah sampah adalah tanggung jawab pemerintah. Padahal, jika hanya pemerintah saja tanpa partisipasi masyarakat, maka hal tersebut tidak ada artinya (Sugrawati, 2023).

Tabel 1 Data Sampah Nusa Tenggara Barat

No	Provinsi	Kabupaten	Proyeksi Sampah (ton/hari)	Rata-rata Sampah Tertangani (ton/hari)	Persentase
1.	Nusa Tenggara Barat	Kota Mataram	342,60	281,91	82,28
2.	Nusa Tenggara Barat	Lombok Barat	508,93	96,30	18,92
3.	Nusa Tenggara Barat	Lombok Tengah	356,77	152,45	42,73
4.	Nusa Tenggara Barat	Lombok Timur	516,15	180,45	34,96
5.	Nusa Tenggara Barat	Lombok Utara	90,62	63,90	70,51
6.	Nusa Tenggara Barat	Kab. Sumbawa	188,76	97,40	51,60
7.	Nusa Tenggara Barat	Sumbawa Barat	90,07	50,31	55,85
8.	Nusa Tenggara Barat	Dompu	102,94	64,40	62,56
9.	Nusa Tenggara Barat	Kabupaten Bima	386,65	46,20	11,95
10.	Nusa Tenggara Barat	Kota Bima	90,06	94,80	105,26
Total Provinsi NTB			2.673,56	1.128,11	42,20

Sumber : BPS NTB 2023

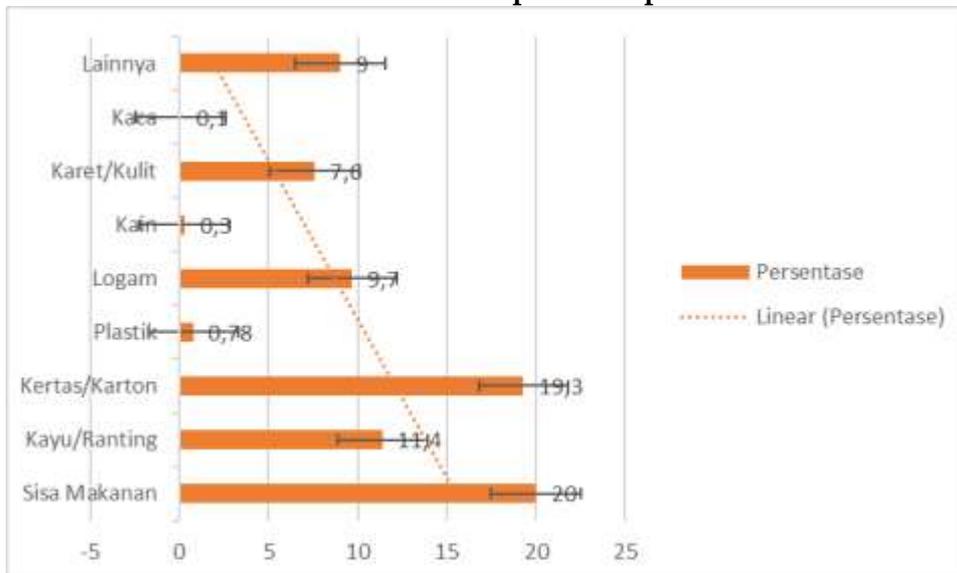
Dari data diatas sampah di Nusa Tenggara Barat Tertinggi yakni Kota Bima 105,26%, kemudian Kota Mataram sebanyak 82,28%, sebanyak 70,51% Kabupaten Lombok Utara, 62,56% Kabupaten Dompu, 55,85% Kabupaten Sumbawa Barat, Sebanyak 51,60% Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Lombok Tengah 42,73%, Kabupaten Lombok Timur 34,96%, sebanyak 18,92% Kabupaten Lombok Barat, dan sebanyak 11,95% Kabupaten Bima.

Dari data diatas sampah dikota Mataram sebanyak 82,28% hal ini dikarenakan masih banyak Masyarakat yang belum mengetahui bahwa Pemerintah Provinsi NTB mempunyai program NTB zero waste, masyarakat merasa program tersebut belum disosialisasikan secara menyeluruh oleh pemerintah sehingga masih banyak masyarakat yang belum mengetahuinya. Dukungan pemerintah, sumber daya anggaran, dan personel (SDM) menjadi faktor pendorong terlaksananya program zero waste ini, sedangkan disinsentifnya adalah kesadaran masyarakat serta sarana dan prasarana (Baiq Handini Lora Padian et al., 2022).

Dari data diatas sebanyak 18,92% sampah di Kabupaten Lombok Barat. hal ini dikarenakan prinsip pengelolaan sampah dengan Pembangunan tempat pembuangan sampah konsep 3R yaitu, Reduce, Reuse dan Recycle (mengurangi, menggunakan kembali, dan mendaur ulang) atau TPS 3R yang merupakan salah satu upaya penanganan permasalahan sampah di Kabupaten Lombok Barat. Pembangunan TPS 3R juga menjadi salah satu strategi dalam penerapan program zero waste khususnya di Lombok Barat dan NTB pada umumnya. Kehadiran TPS 3R dapat menjadi kegiatan pemberdayaan Masyarakat khususnya yang bernilai ekonomi yang menghasilkan pendapatan seperti pengomposan, daur ulang, dan untuk

kerajinan tangan (grafikanews.com, 2020). Sampah di Kabupaten Lombok Barat masih menjadi persoalan klasik yang belum mampu dituntaskan. Penanganan sampah terkendala jumlah armada dan kondisi cuaca, karena adanya acara keagamaan menyebabkan meningkatnya produksi sampah yang didominasi sampah limbah rumah tangga (Aini et al., 2022); (Bysuarantb.com, 2022).

Grafik 1 Persentase Timbulan Sampah Kabupaten Lombok Barat



Sumber : Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Tahun 2023

Berdasarkan jenisnya, mayoritas timbulan sampah di Kabupaten Lombok Barat pada tahun 2022 berupa sampah sisa makanan sebanyak 20,00%. Selanjutnya sampah kertas atau karton terdapat pada urutan kedua dengan jumlah 19,30%. Sebanyak 11,40% berupa kayu atau ranting, 9,70% sampah logam, dan sampah karet atau kulit sebanyak 7,60%. Ada pula sebanyak 0,78% sampah plastik, sampah kain sebanyak 0,30%, sampah kaca 0.10% dan 9,00% sampah jenis lainnya

Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R (Reduce, Reuse, Recycle) memiliki peranan penting dalam pengelolaan sampah di tingkat kota atau daerah, termasuk peran aktif pemerintah dan masyarakat. Daur ulang sampah kota merupakan salah satu kegiatan yang harus dilakukan pemerintah secara maksimal. Pada dasarnya penerapan TPS 3R berorientasi pada konsep Reduce, Reuse dan Recycle yang bertujuan untuk mengurangi jumlah sampah di tingkat masyarakat atau daerah sehingga secara efektif mengurangi beban sampah yang diolah di TPA (Sumarab et al., 2022)

Pengelolaan sampah merupakan suatu kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkelanjutan yang mencakup pengurangan produksi sampah. Untuk meminimalisir permasalahan sampah, pengelolaan sampah harus dilakukan dari bawah ke atas. Permasalahan sampah memang tidak ada habisnya. Permasalahan sampah sudah menjadi permasalahan yang serius terutama di kota-kota besar dan daerah padat penduduk. Khususnya dikawasan Desa Bengkel Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat, masih terdapat tumpukan sampah di pinggir jalan atau di lahan kosong yang bukan TPS.

Pentingnya peneliti melakukan penelitian ini agar dapat mengidentifikasi dan mengetahui sejauh mana permasalahan pengelolaan sampah sistem zero waste yang ada di Desa Bengkel Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat sehingga dapat memberikan solusi terhadap permasalahan tersebut. Dan juga bisa melihat sejauh mana kebijakan pengelolaan sampah sistem zero waste yang direncanakan

pemerintah diterapkan di Desa Bengkel, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif (Sugiyono, 2015). Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh langsung dari obyek yang diteliti atau dari keterangan pihak pemerintah desa, Swasta, Wisatawan, Masyarakat. Selain itu juga didukung data sekunder yang merupakan data yang diperoleh dari dokumen, publikasi-publikasi, atau literatur berupa buku-buku, media cetak maupun online terkait Pariwisata. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri atas observasi (observation), wawancara (interview), dan dokumentasi (documentation). Sedangkan teknik analisa data dalam penelitian ini menggunakan model interaktif yang terdiri dari tiga hal utama, yaitu; (1) reduksi data; (2) penyajian data; dan (3) penarikan kesimpulan/verifikasi (Zitri et al., 2022), (Sugiono, 2014). Nvivo adalah perangkat lunak yang membantu peneliti metode kualitatif dan campuran dengan analisis data dan juga dari awal penelitian. Nvivo adalah contoh Qualitative Data Analysis Software (QDAS) (Perangkat Lunak Analisis Data Kualitatif) (Zitri, Amil, et al., 2024). Pengembangan Nvivo berlanjut dengan masukan yang luas dari para peneliti mengenai keserbagunaan metode pemrosesan data. Efisiensi yang diberikan oleh perangkat lunak ini membebaskan waktu yang dihabiskan untuk mengatur data dan memungkinkan peningkatan yang berfokus pada verifikasi makna yang tersimpan. Fungsi penyimpanan, pengurutan, pencocokan, dan pencatatan dapat digunakan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian tanpa kehilangan akses ke sumber data atau konteks data (Zitri, Rifaid, et al., 2024)

HASIL DAN DISKUSI/ANALISIS

Desa Bengkel merupakan salah satu dari 12 (dua belas) desa yang ada di Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Merupakan desa tua seluas ±180,10 hektar yang terdiri dari 9 (sembilan) dusun. Menurut penuturan sesepuh zaman dahulu, Desa Bengkel sudah ada sejak ±1890 dan didirikan oleh AMEN TEKER (Kantor desa bengkel, 2023). Sebutan Bengkel diambil dari nama pohon sebangsa ketapang kencana dengan nama latin (Madagaskar Almond) yang masyarakat sasak bengkel menyebutnya “LOLON BENGKEN”. Pada saat itu terdapat sebuah “Tenten” (pasar kecil) tempat jual beli untuk memenuhi keperluan sehari-hari dengan sistem barter yang tenten tersebut di pagari sekelilingnya oleh Pohon Bengken. Berdasarkan hal tersebut maka sebutan desa bengkel mulai dipakai oleh masyarkat sekitar sampai saat ini. Posisi tenten yang dulu, berada tepat berdirinya bangunan kantor desa bengkel saat ini.

Desa Bengkel mempunyai Jumlah Penduduk 8.876 Jiwa, yang tersebar dalam 9 Dusun dengan Perincian sebagaimana tabel :

Table 2 Jumlah Penduduk Desa Bengkel

No	Dusun	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Jumlah/ KK
1	Selatan Induk	388	398	786	245
2	Selatan Mekar	519	535	1.054	330
3	Timur	491	490	981	297
4	Timur Mekar	338	367	705	211
5	Utara Timur	423	424	847	248
6	Utara Tengah	462	468	930	328

7	Utara Barat	473	432	905	299
8	Barat	897	935	1832	596
9	Datar	425	411	836	239
	Jumlah	4416	4460	8876	2788

Sumber : Kantor Desa Bengkel, 2023

Dari tabel diatas dapat dilihat jumlah KK pada Dusun Bengkel Selatan Induk Sebanyak 245, dengan jumlah penduduk sebanyak 786 terdiri dari laki-laki sebanyak 388 dan perempuan sebanyak 398, kemudian Dusun Bengkel Selatan Mekar sebanyak 330 KK dengan jumlah penduduk 1.054 terdiri dari 519 laki-laki dan 535 perempuan, sebanyak 297 KK pada Dusun Bengkel Timur dengan jumlah penduduk 981 terdiri dari laki-laki sebanyak 491 dan perempuan sebanyak 490.

Pada Dusun Bengkel Timur Mekar sebanyak 211 KK dengan jumlah penduduk 705 terdiri dari laki-laki 338 dan perempuan sebanyak 367, Sebanyak 248 KK pada Dusun Bengkel Utara Timur dengan jumlah penduduk 847 terdiri dari laki-laki sebanyak 423 dan perempuan sebanyak 424, Dusun Bengkel Utara Tengah dengan jumlah KK 328 dan jumlah penduduk sebanyak 930 terdiri dari laki-laki sebanyak 462 dan perempuan sebanyak 468. Sebanyak 299 KK pada Dusun Bengkel Utara Barat dengan jumlah penduduk 905 terdiri dari laki-laki 473 dan perempuan sebanyak 432, pada Dusun Bengkel Barat sebanyak 596 KK dengan jumlah penduduk 1.832 terdiri dari laki-laki sebanyak 897 dan perempuan sebanyak 935, kemudian pada Dusun Datar sebanyak 239 KK dengan jumlah penduduk 836 terdiri dari laki-laki sebanyak 425 dan perempuan sebanyak 411.

Hubungan jumlah penduduk dengan kebijakan sampah dapat dianalisis melalui volume sampah yang dihasilkan dan kebutuhan pengelolaannya. Dari data Desa Bengkel, terlihat bahwa semakin besar jumlah penduduk di suatu dusun, semakin banyak potensi sampah yang dihasilkan. Misalnya, Dusun Bengkel Barat dengan jumlah penduduk terbesar (1.832 jiwa) diprediksi menghasilkan volume sampah lebih besar dibandingkan Dusun Bengkel Timur Mekar (705 jiwa). Jumlah penduduk per Kepala Keluarga (KK) juga relevan. Dusun Bengkel Barat memiliki rata-rata 3,07 jiwa per KK, sementara Bengkel Timur Mekar memiliki rata-rata 3,34 jiwa per KK. Dusun dengan jumlah jiwa per KK lebih tinggi cenderung memiliki kebutuhan pengelolaan sampah rumah tangga yang lebih besar.

Selain itu, persebaran penduduk di 9 dusun Desa Bengkel memerlukan kebijakan berbasis wilayah. Dusun dengan jumlah penduduk besar, seperti Bengkel Barat dan Bengkel Selatan Mekar, membutuhkan alokasi armada pengangkut sampah yang lebih banyak dan frekuensi pengangkutan lebih sering untuk mencegah penumpukan sampah. Data ini juga bermanfaat untuk merancang infrastruktur seperti tempat pembuangan sampah sementara (TPS) serta program edukasi pengelolaan sampah rumah tangga. Fokus lebih besar dapat diberikan pada dusun dengan jumlah penduduk tinggi atau kepadatan penduduk yang lebih besar.

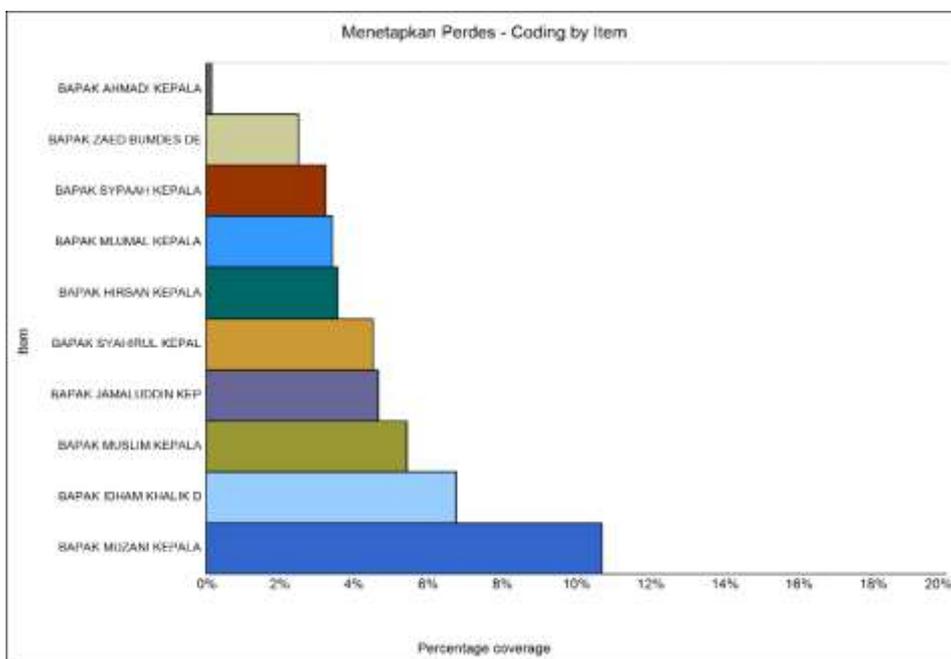
Implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Desa Bengkel Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat dilaksanakan berdasarkan Peraturan Desa Bengkel Nomor 04 tahun 2023 tentang pengelolaan sampah yaitu sebagai berikut: Pemerintah Desa menyelenggarakan pengelolaan kebersihan berupa kegiatan: Pemeliharaan kebersihan atas sampah di Desa Bengkel pengangkutan dan pembuangan sampah ke TPA, memfasilitasi tersedianya tempat sampah sementara dan alat pengangkut sampah, menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan kinerja dalam kegiatan pengelolaan sampah.

Menyelenggarakan pengelolaan kebersihan lingkungan berupa kegiatan pengumpulan dan pengangkutan sampah sampai ke TPA, melakukan kerjasama antara Pemerintah Desa dengan masyarakat atau kelompok masyarakat di dalam Desa, kerjasama yang dimaksud yaitu, penarikan retribusi pelayanan persampahan, peningkatan peran masyarakat dalam pengelolaan sampah, tim sampah dusun bertugas mengeluarkan sampah, menjaga dan membantu menaikkan ke truk dum sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan.

Penyelenggaraan retribusi atas pelayanan persampahan diatur dengan Peraturan Kepala Desa, setiap orang, rumah tangga, Lembaga/badan dan pelaku usaha wajib menjaga kebersihan lingkungannya dan tempat umum, setiap rumah tangga, Lembaga/badan dan pelaku usaha wajib membayar retribusi pelayanan persampahan, bagi yang tidak membayar retribusi tidak memperoleh pelayanan persampahan dan bagi yang membuang sampah di tempat-tempat terlarang akan dikenakan sanksi berupa teguran, sanksi sosial, dan denda berupa uang. Pembahasan dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori keberhasilan implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh (Winter et al., 2001). Dalam menilai keberhasilan kebijakan pengelolaan sampah Desa Bengkel, peneliti membahas penggunaan model implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh (Kolzow et al., 2021).

Hubungan antar organisasi ini dapat dilihat dari 2 aspek yaitu komitmen dan koordinasi antar organisasi. Yang dimana komitmen dan koordinasi organisasi begitu penting dalam proses kerja sama antar organisasi sehingga dalam merealisasikan kebijakan pengelolaan sampah sistem zero waste ini dapat mencapai pada titik optimal. Selain itu dalam merealisasikan Peraturan Desa Tentang Pengelolaan Sampah baik BUMDes, Kepala Dusun maupun tokoh masyarakat ikut terlibat dalam mewujudkan program Pemerintah Daerah yaitu Program Zero Waste Desa Bengkel mengadakan pembelian armada truck pengangkut sampah menggunakan anggaran dana desa. Pada tataran koordinasi, model hubungan antar organisasi sangat penting dan mempengaruhi keberhasilan implementasi, koordinasi antar organisasi antara pemerintah desa dengan kepala dusun tetap dilakukan dengan mengadakan rapat rutin dimana kepala dusun melaporkan terkait dengan perkembangan ataupun permasalahan yang di hadapi.

Gambar 1
 Hasil Koding Narasumber Menetapkan Peraturan Desa Tentang Pengelolaan Sampah



Sumber: Software NVivo, 2023

Dari gambar diatas dapat dilihat hasil wawancara yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa menetapkan peraturan Desa tentang pengelolaan sampah lebih banyak memahami di paparkan oleh Bapak Muzani Selaku Kepala Dusun Datar Desa Bengkel dapat dilihat dari gambar diatas yang menunjukkan 10,68% hasil dari coding by item menetapkan Peraturan Desa tentang pengelolaan sampah melalui NVivo 12. Dalam pemaparan seluruh narasumber berpendapat dibentuknya Peraturan Desa tentang pengelolaan sampah atas dasar untuk mendukung kebijakan dari Pemerintah Daerah yaitu program zero waste. Adapun produksi sampah tertinggi terdapat pada Dusun Bengkel Utara Barat hal ini dikarenakan jumlah penduduk, pergudangan dan pelaku usaha atau UMKM, untuk dusun yang lain seperti, Dusun Selatan Induk, Selatan Mekar, Bengkel Timur, Timur Mekar, Utara Timur, Utara Tengah, Bengkel Barat Dan Dusun Datar produksi sampah rata-rata sama yaitu sampah rumah tangga, produksi sampah meningkat saat ada acara keagamaan seperti pernikahan dan kematian.

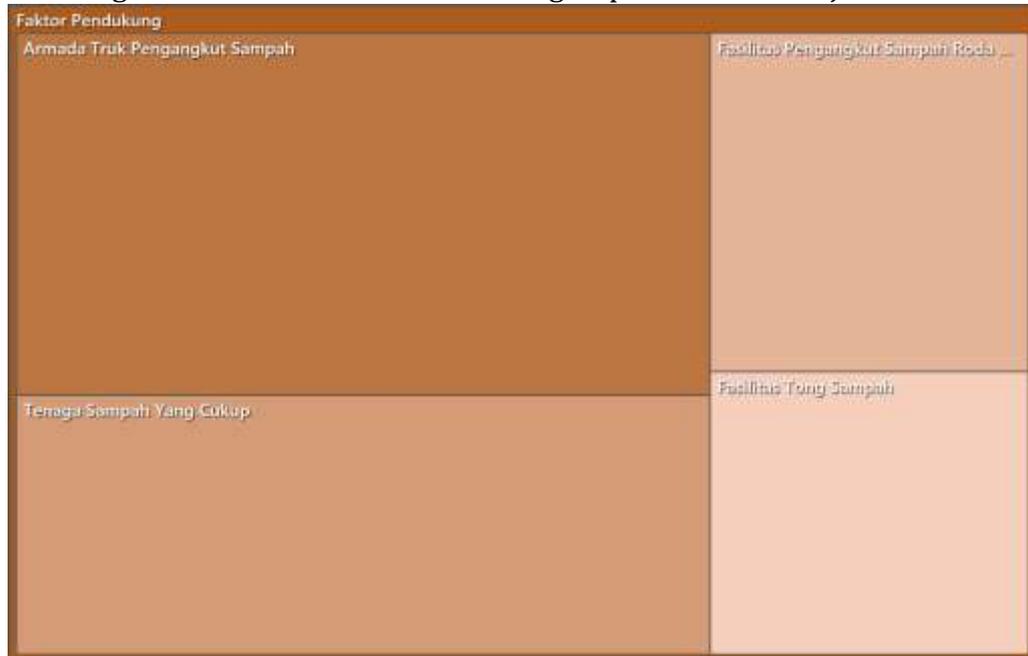
Sesuai dengan Peraturan Desa Bengkel Nomor 04 tahun 2023 tentang pengelolaan sampah terdapat sanksi-sanksi bagi yang melanggar Peraturan Desa tentang pengelolaan sampah yaitu berupa teguran, sanksi sosial, dan denda berupa uang setinggi-tingginya Rp. 500.000. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti bahwa sejak ditetapkan peraturan desa tentang pengelolaan sampah hingga saat ini belum ada ditemukan masyarakat yang melanggar Peraturan Desa tentang pengelolaan sampah tersebut.

mplementasi kebijakan pengelolaan sampah sistem Zero Waste di Desa Bengkel, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Kebijakan ini didukung oleh beberapa faktor pendukung utama yang menjadi penentu keberhasilannya. Pertama, adanya komitmen dari pemerintah desa dalam menyediakan regulasi dan alokasi anggaran untuk mendukung pengelolaan sampah berbasis Zero Waste. Kedua, partisipasi aktif masyarakat yang terlibat dalam kegiatan pemilahan sampah, daur ulang, dan pengolahan sampah organik menjadi kompos.

Selain itu, dukungan teknologi seperti alat pencacah sampah organik serta fasilitas bank sampah turut mempermudah pelaksanaan program ini. Pendidikan dan sosialisasi yang berkelanjutan kepada masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan sampah juga menjadi aspek penting yang meningkatkan kesadaran dan kepedulian lingkungan. Kemitraan dengan pihak ketiga, seperti lembaga swadaya masyarakat dan perusahaan, membantu memperluas cakupan program ini melalui pendanaan dan pelatihan teknis.

Kendati demikian, tantangan seperti kurangnya sumber daya manusia yang terlatih dan konsistensi partisipasi masyarakat masih menjadi hambatan. Dengan penguatan koordinasi antara pemangku kepentingan dan peningkatan kapasitas masyarakat, Desa Bengkel diharapkan mampu mewujudkan pengelolaan sampah yang berkelanjutan melalui sistem Zero Waste.

Gambar 2
Diagram Hirarkis Faktor Pendukung Implementasi Kebijakan



Sumber: Software Nvivo, 2023

Hasil analisis data diagram hierarki di atas menggunakan NVivo 12 dan hasil proses visualisasi menggunakan diagram Hierarchy Chart terdapat beberapa faktor-faktor pendukung dari Implementasi kebijakan pengelolaan sampah sistem zero waste di Desa Bengkel Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat. Faktor-faktor tersebut disajikan dalam bentuk diagram hirarkis.

Dari diagram tersebut diketahui bahwa faktor pendukung dari implementasi kebijakan pengelolaan sampah narasumber menganggap fasilitas armada truk pengangkut sampah sebagai faktor yang mempunyai pengaruh paling besar terhadap implementasi kebijakan pengelolaan sampah, kemudian tenaga sampah yang cukup, fasilitas pengangkut sampah roda 3 dan fasilitas tong sampah. Untuk memperkuat implementasi kebijakan Zero Waste di Desa Bengkel, koordinasi antara berbagai pihak sangatlah penting. Pemerintah desa, dalam hal ini, berperan sebagai fasilitator utama yang memastikan tersedianya sumber daya yang cukup, baik dari segi anggaran maupun dukungan kebijakan. Pelatihan dan pembekalan bagi petugas pengelola sampah serta masyarakat perlu dilakukan secara rutin agar mereka memahami pentingnya pengelolaan sampah yang ramah lingkungan.

Selain itu, keberadaan infrastruktur pendukung seperti tempat pengolahan sampah, pemilahan sampah di tingkat rumah tangga, dan pusat daur ulang menjadi kunci dalam mewujudkan sistem Zero Waste. Masyarakat diharapkan tidak hanya terlibat dalam kegiatan memilah sampah, tetapi juga dalam proses pemanfaatan kembali barang-barang yang masih bisa digunakan. Pendekatan ini dapat mengurangi volume sampah yang dibuang ke tempat pembuangan akhir, serta mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Upaya peningkatan kesadaran juga perlu didorong melalui kampanye-kampanye lingkungan yang melibatkan

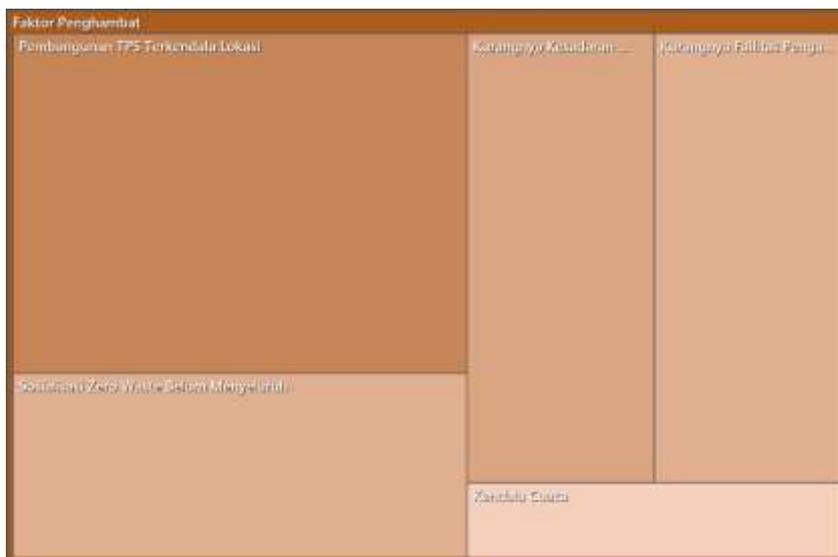
sekolah-sekolah dan organisasi masyarakat setempat. Dalam hal ini, penggunaan media sosial sebagai sarana penyuluhan juga dapat dimaksimalkan. Dengan adanya komitmen yang kuat dari semua pihak, implementasi kebijakan Zero Waste di Desa Bengkel, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, dapat berkembang dengan baik dan menjadi contoh bagi desa-desa lainnya dalam pengelolaan sampah yang lebih berkelanjutan.

Implementasi kebijakan pengelolaan sampah sistem Zero Waste di Desa Bengkel, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, menghadapi beberapa faktor penghambat yang perlu diatasi untuk mencapai tujuan yang optimal. Salah satu penghambat utama adalah rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah berbasis Zero Waste. Masyarakat masih terbiasa dengan pola buang sampah sembarangan dan belum sepenuhnya memahami dampak lingkungan dari sampah yang tidak dikelola dengan baik. Selain itu, keterbatasan infrastruktur dan fasilitas pendukung yang memadai juga menjadi hambatan. Tidak semua rumah tangga memiliki tempat pemilahan sampah yang memadai, dan beberapa daerah masih kekurangan tempat pengolahan sampah yang efisien. Kurangnya fasilitas untuk mendaur ulang dan mengolah sampah organik juga memperburuk situasi.

Tantangan lainnya adalah kurangnya pelatihan dan kapasitas sumber daya manusia yang terlatih untuk menangani pengelolaan sampah dengan prinsip Zero Waste. Tanpa adanya peningkatan kemampuan teknis di tingkat masyarakat dan pengelola, implementasi kebijakan ini akan terhambat. Selain itu, minimnya dukungan anggaran dan keterbatasan sumber daya dari pemerintah desa juga menjadi kendala dalam menyediakan fasilitas yang memadai dan melaksanakan program-program pengelolaan sampah secara berkelanjutan. Untuk itu, diperlukan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan pihak ketiga untuk mengatasi berbagai hambatan tersebut.

Gambar 3

Diagram Hirarkis Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan



Sumber: Software NVivo, 2023

Hasil analisis data diagram hierarki di atas menggunakan NVivo 12 dan hasil proses visualisasi menggunakan diagram Hierarchy Chart terdapat beberapa faktor-faktor penghambat Implementasi kebijakan pengelolaan sampah sistem zero waste di Desa Bengkel Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat. Faktor-faktor tersebut disajikan dalam bentuk diagram hirarkis.

Dari diagram hirarkis diatas terdapat beberapa faktor-faktor Penghambat Implementasi kebijakan pengelolaan sampah sistem zero waste di Desa Bengkel Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat. Faktor-faktor tersebut disajikan dalam bentuk diagram hirarkis mencakup pembangunan tempat pembuangan sampah (TPS) terkendala lokasi atau lahan, sosialisasi zero waste belum menyeluruh, kurangnya kesadaran masyarakat, kurangnya fasilitas pengangkut sampah atau argo dan terkendala cuaca.

Selain masalah kesadaran masyarakat, faktor budaya juga turut mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan Zero Waste di Desa Bengkel. Banyak warga yang masih enggan untuk mengubah kebiasaan lama dalam mengelola sampah, seperti menggunakan plastik sekali pakai dan membuang sampah tanpa memilah. Perubahan budaya ini memerlukan waktu dan pendekatan yang persuasif melalui edukasi dan kampanye yang intens. Di samping itu, keterbatasan infrastruktur di desa menjadi masalah yang cukup signifikan. Banyak daerah yang belum memiliki akses ke fasilitas pengelolaan sampah yang memadai, seperti tempat pembuangan sampah terpilah dan fasilitas pengolahan sampah yang dapat mengurangi volume sampah yang masuk ke TPA (Tempat Pembuangan Akhir). Tanpa adanya fasilitas yang cukup, masyarakat akan kesulitan untuk menerapkan prinsip Zero Waste secara maksimal.

Masalah lain yang dihadapi adalah kurangnya keterlibatan sektor swasta atau pihak ketiga dalam mendukung program ini. Beberapa perusahaan dan lembaga yang bisa menjadi mitra dalam hal pendanaan, penyediaan fasilitas, atau pelatihan belum banyak terlibat dalam pengelolaan sampah. Padahal, kerjasama ini sangat penting untuk meningkatkan kapasitas dan memperluas jangkauan program. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan koordinasi antara pemerintah desa, masyarakat, dan sektor swasta agar hambatan-hambatan ini dapat diatasi dan kebijakan pengelolaan sampah Zero Waste dapat berhasil diterapkan secara efektif di Desa Bengkel.

KESIMPULAN

Pengelolaan sampah berbasis sistem Zero Waste di Desa Bengkel, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, merupakan langkah strategis dalam mendukung kebijakan pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Kebijakan ini bertujuan untuk meminimalkan dampak lingkungan akibat sampah melalui pendekatan *reduce, reuse, dan recycle*. Implementasi kebijakan ini didasarkan pada peran serta aktif pemerintah desa, masyarakat, dan pihak terkait lainnya dalam mewujudkan lingkungan yang lebih bersih dan sehat. Desa Bengkel telah mengadopsi berbagai strategi, seperti program edukasi kepada masyarakat, penyediaan fasilitas pengelolaan sampah, dan pengembangan inovasi berbasis teknologi tepat guna. Edukasi masyarakat menjadi salah satu fokus utama untuk memastikan pemahaman dan keterlibatan warga dalam mendukung kebijakan Zero Waste. Pemerintah desa secara rutin mengadakan sosialisasi, pelatihan, dan kampanye yang bertujuan meningkatkan kesadaran tentang pentingnya pengelolaan sampah yang baik. Selain itu, pengadaan fasilitas pendukung, seperti bank sampah, tempat pembuangan sampah terpilah, dan sistem komposting, turut mendorong masyarakat untuk terlibat aktif dalam pengelolaan sampah di tingkat rumah tangga. Namun, implementasi kebijakan ini tidak terlepas dari tantangan. Keterbatasan anggaran dan sarana prasarana masih menjadi kendala utama dalam pelaksanaan program Zero Waste secara optimal. Selain itu, perbedaan tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pengelolaan sampah

menyebabkan penerapan kebijakan ini belum merata di seluruh lapisan masyarakat.

Dalam beberapa kasus, masih ditemukan perilaku membuang sampah sembarangan yang menjadi hambatan dalam mencapai tujuan kebijakan Zero Waste. Meskipun demikian, upaya yang telah dilakukan pemerintah desa mulai menunjukkan hasil positif. Sampah yang dibuang ke tempat pembuangan akhir (TPA) berhasil berkurang secara signifikan, sementara pemanfaatan sampah organik melalui komposting dan sampah anorganik melalui daur ulang mulai meningkat. Hal ini tidak hanya membantu mengurangi beban TPA, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat melalui pengelolaan sampah yang produktif. Kesuksesan awal kebijakan ini menunjukkan bahwa pengelolaan sampah berbasis Zero Waste dapat menjadi solusi yang efektif jika didukung oleh komitmen yang kuat dari semua pihak. Ke depan, diperlukan peningkatan kerja sama dengan berbagai pihak, baik dari sektor pemerintah, swasta, maupun lembaga non-pemerintah, untuk mengatasi tantangan yang ada. Selain itu, perlu dilakukan inovasi dan evaluasi berkala untuk memastikan keberlanjutan program ini. Dengan langkah-langkah tersebut, Desa Bengkel memiliki potensi besar untuk menjadi model desa percontohan dalam pengelolaan sampah berbasis Zero Waste, sekaligus memberikan kontribusi nyata dalam menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan.

REFERENSI

- Aini, M., Zitri, I., & Darmansyah, D. (2022). Kolaborasi Pemerintah Desa Dan Masyarakat Dalam Menangani Covid-19 Di Desa Mbuju Kecamatan Kilo Kabupaten Dompu Tahun 2021. *Seminar Nasional Lppm ...*
- Andayani, S., Zitri, I., & Darmansyah, D. (2024). Pengaruh akuntabilitas dan transparansi dana desa terhadap tingkat kepercayaan masyarakat di kelurahan Punia Mataram. *Journal Law and Government*, 2(1), 8-19.
- Astuti, P., Ashari, W. K., Ouktafia, F., Wahyudi, D., Jailani, M. A., & Zitri, I. (2023). Strategi Peningkatan Daya Tarik Di Destinasi Tanjung Bias Desa Senteluk Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat. *Jurnal Paradigma (Jp)*, 12(2).
- Baiq Handini Lora Padian, Baiq Risning Aulia Putri Lestari, Risma Hidayati, & Dadi Setiadi. (2022). Sosialisasi Zero Waste Di Desa Mujur Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah. *Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA*. <https://doi.org/10.29303/jpmpi.v5i1.1447>
- Basri, H., Suharyanto, S., Adiwiharja, C., Baidawi, T., Arifin, Y. T., Saefudin, D. F., Abdussomad, A., & Apriliah, W. (2021). Meningkatkan Potensi Desa Guna Menjadi Desa Wisata Yang Bersih Dan Asri Pada Desa Dewisari Karawang. *Abditeknika Jurnal Pengabdian Masyarakat*. <https://doi.org/10.31294/abditeknika.v1i1.218>
- Bharata, W., Auliyaa, T. M., & Oliviani, N. (2023). Pengelolaan dan Pemanfaatan Sampah Plastik dengan Metode Ecobrick menjadi Barang yang Bermanfaat di Desa Liang Ulu. *Jurnal Pengabdian Masyarakat MIPA Dan Pendidikan MIPA*. <https://doi.org/10.21831/jpmmp.v7i1.53355>
- Kolzow, D. R., Smith, C. C. C., Serrat, O., Dilie, H. M., Zeeshan, S., Ng, S. I., Ho, J. A.,

- Jantan, A. H., Massey, J., Sulak, T., Sriram, R., Dennis, R. S., Bocarnea, M., Hai, T. N., Van, Q. N., Herbert, S. L., So-Jung Kim, Kyoung-Seok Kim, Y.-G. C., Guillaume, D. O., Honeycutt, D. A., ... Ingram, O. C. J. (2021). Unit 5 Theories of Leadership. *International Journal of Organizational Leadership*.
- Rahmawati, S., Widayat, R. M., & Zitri, I. (2024, June). COLLECTIVE ACTION DINAS PARAWISATA DALAM PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI GUNA MENINGKATKAN INDUSTRI PARAWISATA DI KABUPATEN BIMA. In SEMINAR NASIONAL LPPM UMMAT (Vol. 3, pp. 1094-1107).
- Rahman, A. F. B., & Zitri, I. (2023). Collaborative Governance Dalam Perkembangan Pariwisata Di Kawasan Senggigi Kabupaten Lombok Barat. *Nusantara Hasana Journal*, 3(2), 144-159.
- Nurlina, Ichsan, R., & Simon, S. S. (2014). Analisis Tingkat Kerawanan Dan Mitigasi Bencana Banjir Di Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar. *Jurnal Fisika FLUX*.
- Pepadu, J., Hurum, P. H., Bakti, L. A. A., Sukartono, S., Kusumo, B. H., Suwardji, S., & Raehanayati, R. (2023). PENGELOLAAN SAMPAH PARIWISATA DAN RUMAH TANGGA DENGAN SISTEM TERPADU DI GILI TRAWANGAN. *Jurnal Pepadu*. <https://doi.org/10.29303/pepadu.v4i1.2238>
- Sholihah, R., & Akliyah, L. S. (2022). Kajian Sistem Pengelolaan Sampah berdasarkan Aspek Peran Serta Masyarakat di Kawasan Perkotaan Merauke. *Bandung Conference Series: Urban & Regional Planning*. <https://doi.org/10.29313/bcsurp.v2i2.3188>
- Sugiono, P. D. (2014). Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif.pdf. In *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*.
- Sugiyono, P. D. (2015). Metode Penelitian Pendidikan Sugiyono 2015 BAGIAN 3. In *Penerbit AlphaBeta*.
- Sugrawati, S. (2023). SUKSESKAN PROGRAM ZERO WASTE DENGAN PROJEK PENGUATAN PROFILE PELAJAR PANCASILA. *Jurnal Locus Penelitian Dan Pengabdian*. <https://doi.org/10.58344/locus.v2i9.1601>
- Sumarab, N., Wilson Bogar, & Fitri Herawati Mamonto. (2022). The Implementation of Restaurant Tax in Tomohon. *Journal of Social Science*. <https://doi.org/10.46799/jss.v3i2.321>
- suheldi, r., zitri, i., ali, m., & jaelani, m. a. (2024). enhancing senggigi as a lombok tourism destination: a development strategy. *komunitas*, 15(1), 51-78.
- Sunaryo, S., Nazila, S. R., Hermawan, H., & Hasanah, N. (2022). PENDAMPINGAN PENGELOLAAN SAMPAH GUNA MEMBANTU PENINGKATAN PENDAPATAN EKONOMI DAN KETAHANAN PANGAN PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI DESA PURBASARI. *SOROT: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*. <https://doi.org/10.32699/sorot.v1i1.2501>
- Winter, S. C., & May, P. J. (2001). Association for Public Policy Analysis and Management Motivation for Compliance with Environmental Regulations. *Source Journal of Policy Analysis and Management*.
- wulandari, s., hadi, a., zitri, i., & subandi, a. (2024, june). strategi kelompok sadar

wisata dalam pengembangan obyek wisata dengan model pentahelix (studi kasus pantai wane kabupaten bima). in seminar nasional lppm ummat (vol. 3, pp. 1085-1093).

- Zitri, I., Amil, A., & Lestanata, Y. (2024). Policy Communication on Twitter Social Media: Development of Sustainable Tourism Destinations in West Nusa Tenggara. *Jurnal Public Policy*, 10(1), 34–43.
- Zitri, I., Lestanata, Y., & Umami, R. (2022). Inovasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Sistem Zero Waste di Nusa Tenggara Barat Model Pentahelix The Zero Waste System Waste Management Policy Innovation in West Nusa Tenggara the Pentahelix Model. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 21(01), 107–119. <https://doi.org/10.35967/njip.v21i1.335>
- Zitri, I., Rifaid, R., Lestanata, Y., & Kurniawan, C. (2024). Navigating digital tourism governance: a case study of branding strategies in the Mandalika special economic zones. *Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 14(1), 148–159.
- Zitri, I., Rosiastawa, A., Amil, & Hadi, A. (2023). Mencapai Target Sustainable Development Golas's (SDG's) di Desa Sermong Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2021. *Journal of Social and Policy Issues*. <https://doi.org/10.58835/jspi.v3i2.101>